

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kepadatan penduduknya masih relatif sangat tinggi. Menurut sensus penduduk di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 menyatakan bahwa hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 1.910.931 km², dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduknya sebesar 124 orang per km². Dibandingkan pulau lainnya pulau Jawa adalah memiliki persentase penduduk paling banyak yaitu mencapai 58%. (BPS, 2010). Pemerintah mengadakan program keluarga berencana (KB) agar laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) di tahun 2011 yang terintegrasi dalam pelayanan KB yang memiliki tujuan dan harapan meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi (juknis jampersal, 2011). Kebijakan jampersal yang terintegrasi tersebut, pelayanan KB lebih diarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, AKBK / susuk KB, Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW). Agar dalam penyediaan alat / obat kontrasepsi dan sarana sesuai dengan yang diharapkan, pelayanan KB diperlukan adanya pendataan ibu hamil, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), konseling saat pasca persalinan dan pasca keguguran, kemudian memberi pelatihan bagi dokter dan bidan khususnya pelayanan KB MKJP (juknis jampersal, 2011).

Dewasa ini hampir 380 juta pasangan yang menjalankan KB yaitu 65-75 juta diantaranya, terutama di negara berkembang (WHO, 2010). Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2005-2007 menyatakan bahwa tingkat penggunaan kontrasepsi di Indonesia terdiri dari pil 12,4%, Intra

Uterine Device (IUD) 6,2 % dan vasektomi 0,4 % (BKKBN, 2004). Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan di kabupaten Purworejo selama tahun 2012, yaitu pencapaian jumlah peserta KB baru sampai dengan akhir bulan Desember 2012 sebanyak 16.099 peserta, dengan alat kontrasepsi yang digunakan mayoritas KB suntik. Sebanyak 7.043 peserta atau 43,75%, jumlah peserta KB aktif sampai akhir bulan Desember 2012 adalah 101.376 peserta, untuk Pasangan Usia Subur sebanyak 122.131 pasangan. Dilihat dari kesetaraannya, peserta KB wanita masih mendominasi yaitu 95,84% dan peserta KB pria 4,16%, dari hasil data tersebut semua peserta belum semuanya mencapai target untuk mengikuti program KB (Depkes, 2012).

Penyediaan alat / obat kontrasepsi dan sarana pendukung pelayanan KB ini diperlukan adanya beberapa proses kegiatan seperti pendataan ibu hamil, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), konseling saat pasca persalinan dan pasca keguguran, memfasilitasi pelatihan bagi dokter dan bidan khususnya pelayanan KB MKJP (juknis jampersal, 2011). Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa ada pengaruh hubungan tingkat pendidikan dengan penggunaan metode kontrasepsi, berdasarkan hasil dari *chi-square* dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Jenu sebanyak 27 orang (27%) responden berpendidikan rendah yang menggunakan metode kontrasepsi tidak efektif, sedangkan untuk 14 orang (14%) responden berpendidikan tinggi yang menggunakan metode kontrasepsi yang tidak efektif. Hasil tersebut memiliki nilai $p = 0,035 < \alpha$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan metode kontrasepsi pada PUS di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur (Baroya, 2011). Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan keikutsertaan melaksanakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti Jampersal, dimana objek penelitiannya spesifik pada ibu nifas peserta program Jampersal.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan keikutsertaan melaksanakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti Jampersal di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan keikutsertaan melaksanakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti Jampersal di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan keikutsertaan melaksanakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti jampersal berpendidikan rendah.
- b. Mengetahui hubungan keikutsertaan melaksanakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti jampersal berpendidikan tinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah informasi tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan keikutsertaan melaksanakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti Jampersal sehingga dapat meminimalisir angka kejadian terhadap ketidakpatuhan pelaksanaan program KB Jampersal.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Dinas Kesehatan : penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk memberikan informasi kepada instansi pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan pendekatan untuk ber KB, dan dapat memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan persalinan.
- b. Bagi peserta jampersal : dapat lebih mengetahui pentingnya keikutsertaan dalam ber KB dan mendapatkan manfaat dari ber KB.

- c. Bagi Pemerintah : dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalam membuat kebijaksanaan pelayanan kesehatan persalinan.
- d. Bagi peneliti yang lain : dapat dijadikan pedoman atau sebagai masukan peneliti selanjutnya.